

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Ashofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badrulzaman, Darus Mariam. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- Dewi, Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjon, Philipus M, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, M Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- HS, Salim. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publishing.
- Iswari, Retno Tranggono dan Fatma Latifah. 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, A Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-pokok perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen DiIndonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Raharjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. 1989. *Asas-asas Hukum Perdata*. Purwokerto: Harsa.
- , 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Aditya Bhakti.
- , 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2004, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Suyadi. 2014. *Buku Ajar Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Wasitaatmadja, Syarif M. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Depok: Universitas Indonesia Press.

Widjaja, Gunawan. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wignjodipuro, Surojo. 1974. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4. 1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan



